

# TAKTIK EKONOMI WARGA TABUJI MENGHADAPI RENCANA AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL DI DESA BARU PULAU OBI

ZUULKIFLI<sup>1</sup>, HUDAN IRSYADI<sup>2</sup>

*Prodi Antropologi Sosial<sup>1,2</sup>, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun*

*Pos-el : zulkifli2020@unkhair.ac.id*

## Abstrak

Telah banyak artikel yang membahas tentang dampak ekonomi aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sekitar tambang, tetapi masih minim yang fokus membahas respons khususnya taktik ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan dalam menghadapi rencana aktivitas pertambangan. Tujuan studi ini adalah mendeskripsikan motif dibalik penerapan taktik ekonomi warga Dusun Tabuji Desa Baru Kecamatan Obi menghadapi rencana aktivitas pertambangan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menampilkan deskripsi emik tentang taktik ekonomi warga Desa Baru di Dusun Tabuji terhadap Rencana Aktivitas Pertambangan. Hasil penelitian menemukan bahwa anggapan masyarakat tentang dampak negatif aktivitas pertambangan yang akan dirasakan dalam waktu yang lama, bahkan hingga anak cucu mereka memunculkan suatu inisiatif untuk menemukan celah dimana mereka bisa menemukan keuntungan-keuntungan ekonomi bahkan sebelum perusahaan pertambangan melakukan aktivitas eksplorasinya. Inisiatif tersebut dipraktikkan dalam bentuk taktik ekonomi berupa praktik resiprositas yang dibangun atas kesepakatan-kesepakatan antara warga dengan pihak perusahaan, baik melalui pertemuan formal maupun pertemuan non-formal. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terjalin melalui dua arah, yakni terjalin melalui jalur intervensi sosial berupa fenomena resistensi dan konflik, dan pendekatan personal antara warga dengan pihak perusahaan.

**Kata Kunci:** Taktik Ekonomi, Resistensi dan Konflik, Rencana Pertambangan, Dusun Tabuji Obi.

# ECONOMIC TACTICS OF TABUJI RESIDENTS FACING NICKEL MINING ACTIVITY PLAN IN THE NEW VILLAGE OF OBI ISLAND

ZUILKIFLI<sup>1</sup>, HUDAN IRSYADI<sup>2</sup>

*Prodi Antropologi Sosial<sup>1,2</sup>, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun*

*Pos-el : [zulkifli2020@unkhair.ac.id](mailto:zulkifli2020@unkhair.ac.id)*

## Abstract

There have been many articles that discuss the economic impact of mining activities or communities around the mine, but there is still a lack of focus on discussing the response, especially the economic tactics of communities living around mining sites in the face of planned mining activities. The purpose of this study is to describe the motives behind the application of economic tactics of Tabuji Hamlet residents of Baru Village, Obi Subdistrict to face mining activity plans. Qualitative research methods with an anthropological approach were used as data collection techniques in this study including literature study, observation and interviews. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing to display emic descriptions of the economic tactics of New Village residents in Tabuji Hamlet towards the Mining Activity Plan. The results of the study found that the community's assumption about the negative impact of mining activities that will be felt for a long time even until their children and grandchildren give rise to an initiative to find gaps where they can find economic benefits even before mining companies carry out their exploration activities. The initiative is practised in the form of economic tactics in the form of reciprocity practices built on agreements between residents and the company both through formal meetings and non-formal meetings. These agreements are established through two directions, namely through social intervention channels in the form of resistance and conflict phenomena, and personal approaches between residents and the company.

**Keywords:** Economic Tactics, Resistance and Conflict, Mining Plan, Tabuj Hamlet.

## PENDAHULUAN

Masalah pertambangan selalu menjadi salah satu isu populer di setiap tahunnya. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya sorotan-sorotan tentang persoalan lingkungan, persoalan ekonomi serta persoalan sosial yang ditimbulkan mulai dari tahap prospeksi hingga pada tahap pengolahan dan pemurnian hasil tambang. Pulau Halmahera dan Pulau Obi sebagai bagian dari provinsi Maluku Utara dengan biji nikelnya yang menjadi komoditas unggulan di sektor pertambangan, memicu ketertarikan perusahaan-perusahaan tambang masuk mengelola demi meraup keuntungan. Misalnya di Kecamatan Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Harita Group hadir dengan beberapa anak perusahaannya seperti Jikodolong Mega Pertiwi (JMP), Obi Anugerah Mineral (OAM), Halmahera Jaya Fornikel (HJF), dan perusahaan lainnya juga ikut serta mengambil bagian dalam industri ini.

Kehadiran perusahaan pertambangan tadi disertai munculnya resistensi di tengah-tengah masyarakat yang bisa saja sewaktu-waktu akan berubah menjadi konflik. Pemaknaan tentang resistensi di sini fokus pada penggambaran bentuk-bentuk perlawanan yang sebenarnya ada dan terjadi disekitar dalam masyarakat, yang mana mereka tidak punya kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka tetapi mempunyai cara lain dalam menghindari intervensi dari negara dan perusahaan (Wahyuni, 2018:8). Sedangkan konflik (*conflict*) didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak yang memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan meliputi ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepehaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku, dan sebagainya (Wardana et al., 2024:2).

Banyak literatur menegaskan bahwa aktivitas perusahaan tambang di berbagai daerah di Indonesia banyak menimbulkan dampak negatif berupa konflik vertikal maupun konflik horizontal di tengah masyarakat. Konflik horizontal, salah satunya yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Konflik tersebut dipicu oleh kegiatan eksplorasi tambang emas PT SMN berada di hutan kawasan Perhutani di sekitar pemukiman masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan warga (Zuhdi et al., 2018:47). Begitu pula di Samarinda, keresahan terhadap kondisi lingkungan yang cukup kronis akibat dampak dari pertambangan batubara menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat (Mulka, 2020:214), di Kelurahan Makroman, terdapat kegiatan pertambangan batubara memicu mentalitas negatif masyarakat hingga merusak tatanan sosial kekerabatan warga, dikarenakan dalam internal keluargapun sering terjadi perselisihan karena perbedaan kepentingan dengan perusahaan, yang oleh perusahaan menerapkan strategi adu domba hingga bekerjasama dengan milisi sipil merekrut pemuda dan pengangguran untuk menghadapi dan menghalau aksi warga yang kontra dengan perusahaan (Risal et al., 2017:422-423).

Kasus lainnya misalnya yang terjadi pada Suku Kamoro Irian Jaya di Papua bagian selatan karena adanya perbedaan kepentingan atas sumber daya alam di sekitar tambang emas PT Freeport. Konflik dan integrasi sosial antara masyarakat lokal, pendatang, maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mimika. Masyarakat Kamoro memiliki pranata lokal yang berlaku secara semi otonom tentang kepemilikan tanah secara tradisional berupa penonjolan penguasaan dan pewarisan hak-hak ulayat berdasarkan prinsip-prinsip genealogis *clan* (taparu) Taparu menjadi basis sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pada suku Kamoro, terdapat beberapa macam Taparu yakni Muaowe, Nayarepi, Amayeripi, Matuaowe, Feri Iwaowe, Awora waowe, Firau Putawe, Tumuamirimo, dan Irawaowe. Konflik terjadi antara taparu Muaowe-Matuaowe melawan taparu Tumuamirimo-Irawaowe karena sengketa batas tanah ulayat yang kebetulan letaknya saling bersebelahan (Brata, 2010).

Dengan persoalan-persoalan tadi, potensi konflik yang mengancam integrasi sosial sewaktu-waktu dapat muncul sehingga menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Baik konflik vertikal maupun konflik horizontal, jika ditelusuri lebih dalam maka kita akan menemukan hipotesis bahwa konflik yang terjadi berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar tambang. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya

masyarakat menikmati hasil pertambangan sehingga muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat, seperti kasus yang terjadi di Tarakan Kalimantan Timur dengan di Nusa Tenggara Timur merupakan (Sondakh, 2017).

Kondisi serupa juga terjadi pada masyarakat dusun Tabuji Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Konflik horizontal terjadi karena terdapat warga yang mendukung kegiatan eksplorasi tetapi tak sedikit pula yang menentangnya dengan alasan yang beragam serta perbedaan kepentingan. Sedangkan konflik vertikal terjadi jika tidak ada upaya pemerintah menginisiasi dan mempertemukan kepentingan mereka dengan pihak perusahaan. Sehingga dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah hingga jajarannya yang menjadi sasaran untuk mereka salahkan dengan alasan bahwa pemerintah daerah ikut merestui kebijakan dari pemerintah di atasnya yang memberikan izin kepada pihak perusahaan sebelum perusahaan pertambangan turun mengeksplorasi lokasi pertambangan. Sementara, mereka juga tidak berdaya melawan kebijakan pemerintah

Ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata akar konflik yang muncul juga sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar tambang. Secara umum, mereka memahami bahwa kehadiran perusahaan pertambangan di setiap daerah pasti menimbulkan dampak negatif, terutama pada aspek lingkungan yang akan dirasakan dalam waktu yang cukup lama. Berangkat dari pemahaman tersebut, muncullah asumsi bahwa kehadiran perusahaan pertambangan di wilayah Desa Baru bagi warga khususnya warga Dusun Tabuji dengan segala dampak eksplorasinya menurut mereka akan mengancam aktivitas perkebunan mereka di daratan. Lahan-lahan di hutan yang mereka kelola sebagai lokasi perkebunan juga berpotensi terancam pembebasan oleh pihak perusahaan. Sementara limbah yang dihasilkan nantinya saat proses pengolahan hasil pertambangan bagi mereka juga akan mengancam ekosistem laut yang menjadi tumpuan pemenuhan konsumsi lauk pauk mereka. Hal tersebut akan mengakibatkan ikan-ikan yang hidup di sekitaran perairan pantai pemukiman warga semakin berkurang. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan hidup mereka bergantung dari sektor perkebunan tadi yang ditunjang oleh aktivitas sebagai nelayan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan harian mereka.

Kondisi tadi yang membuka pemikiran warga Desa Baru khususnya di Dusun Tabuji untuk berfikir mencari dan menemukan solusi agar bisa bertahan hidup di lingkungan mereka, sekaligus mencari celah untuk mendapatkan potensi-potensi ekonomi berupa keuntungan. Pemahaman secara budaya bagi warga Desa Baru bahwa daerah yang mereka mukimi merupakan wilayah kekuasaan mereka yang mereka ibaratkan sebagai rumah mereka, dan merekalah tuan rumahnya. Sementara bagi perusahaan, mereka ibaratkan sebagai tamu yang harus dihormati, tetapi di sisi lain tamu juga harus memperhatikan dan menerapkan aspek tata krama sebagai tamu. Melalui pemahaman inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi warga Desa Baru khususnya bagi warga Dusun Tabuji untuk menjalankan intervensi sosialnya sekaligus menerapkan taktik ekonominya dalam menghadapi rencana aktivitas pertambangan yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga Dusun Tabuji yang masih menjadi wilayah administratif Desa Baru. Dalam konteks penelitian ini, taktik adalah rencana atau tindakan yang sistematis oleh masyarakat Desa Baru untuk mencapai tujuan sebagai pelaksanaan dari strateginya.<sup>1</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi yang bertujuan menggali Taktik Ekonomi Warga Dusun Tabuji tentang Rencana Aktivitas Pertambangan yang ada di Desa Baru dalam kacamata Ilmu Antropologi Ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan melibatkan 16 (enam belas) orang informan yang terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa Baru, Warga Desa Baru termasuk yang bermukim di Dusun Tabuji, serta Tokoh Pemuda dan tokoh masyarakat Dusun Tabuji yang dianggap merasakan situasi sosial yang terjadi di Desa Baru dan mampu

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/taktik>

memberikan penjelasan spesifik mengenai kebutuhan data penelitian ini. Identitas informan yang disajikan dalam penelitian ini disamarkan kemudian diinisialkan untuk menjaga privasi informan penelitian ini yang berkaitan dengan tema Taktik Ekonomi Warga Dusun Tabuji tentang Rencana Aktivitas Pertambangan yang ada di Desa Baru.

Tiga Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni (1) Studi Dokumen yang membantu memberikan informasi umum serta literatur terkait dengan tema penelitian ini; (2) Observasi, dilakukan untuk mengamati kondisi sosial beserta respons dalam bentuk perilaku warga Desa Baru khususnya yang bermukim di Dusun Tabuji tentang Rencana Aktivitas Pertambangan di Wilayah Administratif Desa Baru; dan (3) Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan Respons warga Desa Baru di Dusun Tabuji tentang Rencana Aktivitas Pertambangan; faktor-faktor yang menjadi potensi munculnya konflik antar warga dengan pihak perusahaan, antar sesama warga dan antara warga dengan pihak aparat pemerintah; serta taktik ekonomi mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Analisis data kualitatif dilakukan untuk menyajikan deskripsi *emik* hasil penelitian ini, yang terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kecenderungan antropologi ekonomi dalam mengkaji masalah perekonomian banyak menaruh perhatian terhadap berbagai gejala penerukaran yang tidak melibatkan penggunaan uang sebagai mekanisme pertukaran (Abd Ghafur, 2022; Hudayana, 2020). Mekanisme pertukaran yang dimaksud adalah resiprositas dan redistribusi yang berbeda dengan cara kerja disiplin ilmu ekonomi. Hal tersebut dikarenakan ahli antropologi ekonomi memaknai sistem perekonomian merupakan produk dari suatu sistem sosial masyarakat, sehingga dalam melihat gejala pertukaran, antropologi ekonomi tidak sebatas melihat gejala tersebut sebagai gejala ekonomi semata, melainkan sebagai gejala kebudayaan yang keberadaannya berdimensi luas, termasuk dimensi agama, teknologi, ekologi, politik dan organisasi sosial. Meskipun antropologi menempatkan gejala pertukaran sebagai persoalan yang berdimensi luas, tetapi disiplin ini kurang menaruh perhatian terhadap pertukaran yang menggunakan mekanisme uang yang menjadi ciri dari sistem ekonomi pasar. Sedangkan ilmu ekonomi paling banyak berurusan dengan masalah pertukaran dalam ekonomi pasar (Abd Ghafur, 2022:3).

### 1. Daya Tarik Investasi Pertambangan

Pemerintah menganggap bahwa investasi di industri pertambangan merupakan salah satu penopang utama ekonomi yang dapat memberi pemasukan besar kepada negara melalui pajak dan royalti (Harjanti, 2006). Hal tersebut dikarenakan jumlah cadangan dan produksi beberapa komoditas mineral Indonesia yang masuk 10 besar dunia. Salah satunya adalah nikel, yang menempati posisi nomor satu dunia pada jumlah cadangan dan produksi<sup>2</sup>.

Bagi perusahaan tambang, selain karena adanya keberlimpahan sumber daya alam pada suatu daerah, faktor kepastian hukum juga menjadi motivasi karena akan mempermudah serta memusatkan fokus perusahaan dalam hal manajemen operasional, bukan teralihkan ke hal-hal teknis terutama saat operasonalisasi pertambangan sedang berjalan. Kepastian hukum juga disinyalir berimplikasi terhadap ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan pertambangan (Soelistijo, 2011:80). Pertambangan merupakan salah satu aktifitas yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar (Sudarti & Hindiyati, 2021). Tetapi bagi sebagian masyarakat Dusun Tabuji Desa Baru tidak sepenuhnya demikian. Memang aktivitas pertambangan memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan, tetapi itu hanya untuk sebagian saja. Terdapat banyak rentetan dampak buruk bagi lingkungan yang juga berimplikasi kepada dampak sosial dan masyarakat karena potensi-potensi yang bisa ditimbulkan baik saat aktivitas pertambangan sementara berlangsung maupun saat

---

<sup>2</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/peningkatan-nilai-tambah-mineral-ditargetkan-gaet-investasi-hingga-usd-2128-miliar>

kegiatan paska tambang.

Misalnya berkaitan dengan dampak buruk terhadap lingkungan, aktivitas pertambangan di Dusun Tabuji sangat berpotensi terhadap kerusakan ekosistem pantai dengan adanya rencana reklamasi dan pembangunan pelabuhan oleh perusahaan tambang untuk aktivitas pengangkutan material hasil pertambangan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap dampak sosial masyarakat yakni potensi penurunan hasil tangkapan ikan warga. Berdasarkan penuturan warga, ikan-ikan yang hidup di sekitar pantai tempat mereka bermukim akan berkurang sehingga berpengaruh terhadap banyaknya ikan yang akan mereka tangkap untuk menunjang pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga mereka sehari-hari.

Begitu pula dengan dampak terhadap aktivitas perkebunan yang menjadi tumpuan utama pemenuhan nafkah keluarga mereka, kehadiran perusahaan tambang mengancam kekuasaan lahan hutan yang mereka kelola saat ini, karena terancam pembebasan lahan oleh pihak perusahaan. Tanaman kelapa dan jambu mente yang telah mereka pelihara karena menjadi komoditas utama perkebunan mereka saat ini dihargai tidak sesuai dengan harapan mereka. Selaras yang dikatakan dengan informan lain yang menegaskan bahwa, sebenarnya warga tidak sepenuhnya juga menolak kehadiran perusahaan tambang di sekitar keberadaan perusahaan tambang, karena bisa jadi karena kehadiran perusahaan tambang, akan berdampak pada perkembangan daerah pemukiman mereka. Ia menyimpulkan bahwa kehadiran perusahaan tambang memang di satu sisi dianggap sebagai ancaman oleh warga, tetapi di sisi lainnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas ekonomi warga.

Hikmah yang mereka petik sebagai daya tarik dari keberadaan perusahaan tambang terbukanya potensi-potensi di aspek ekonomi dalam menguatkan pemenuhan kebutuhan keluarga mereka, misalnya keterbukaan lapangan pekerjaan seperti potensi mereka untuk direkrut menjadi karyawan oleh pihak perusahaan, peluang dalam menawarkan jasa bisa saja diwaktu tertentu dibutuhkan oleh pihak perusahaan, maupun barang seperti produk lokal seperti kerupuk yang diolah oleh masyarakat Desa Baru seperti kerupuk berbahan dasar ikan. Pandangan tersebut diutarakan oleh informan salah seorang informan bahwa ada beberapa orang kerabatnya diangkat sebagai karyawan oleh pihak perusahaan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia, Juga terdapat 2 (dua) dari 5 (lima) orang di Kecamatan Obi diangkat menjadi juru bahasa oleh perusahaan yang bertugas menerjemahkan bahasa rakyat ke bahasa mandarin. Artinya adalah pihak perusahaan juga dianggap peduli terhadap warga, dengan catatan warga memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan agar mereka bisa dipekerjakan.

Hikmah lainnya seperti pembangunan infrastruktur seperti bantuan penerangan yang dirasakan oleh beberapa kepala keluarga di Dusun Tabuji, yang mereka sebut sebagai program Tabuji Terang oleh perusahaan pertambangan meskipun belum menyentuh seluruh kepala keluarga yang berjumlah 110 KK di Dusun Tabuji. Harapan mereka kedepannya agar pihak perusahaan juga mempertimbangkan pembangunan di aspek pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa untuk bekal anak-anak mereka, serta aspek sosial lingkungan yang tertuang dalam dokumen tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan khususnya dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, nampak daya tarik kehadiran perusahaan pertambangan bagi masyarakat sekitar cukup beragam yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan. Namun, harapan mereka pula, penting juga untuk mengelola dan memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul agar manfaat yang diperoleh masyarakat dapat maksimal dan berkelanjutan.

## **2. Resistensi dan Konflik Warga Akibat Rencana Pertambangan**

Fenomena resistensi dan konflik yang terjadi dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai wujud intervensi sosial masyarakat Desa Baru untuk mendapatkan sesuatu yang layak menurut mereka. Resistensi dan konflik menjadi salah satu *power* sekaligus instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi mereka yang sebagai bekal untuk bertahan hidup di lingkungan yang telah mereka mukimi, sekaligus instrumen awal dalam menerapkan taktik

resiprositas agar tercipta perbandingan lurus antara manfaat ekonomi yang dirasakan oleh warga Desa Baru dengan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan yang akan dirasakan pula oleh warga dalam waktu yang cukup lama.

### **2.1. Faktor-faktor yang menjadi potensi munculnya resistensi dan konflik antara warga dengan pihak Perusahaan Pertambangan**

Seperti di daerah lain, pertambangan (nikel) lainnya, dampak buruk industri pertambangan selalu menjadi stereotipe bagi warga yang bermukim di sekitarnya karena menyangkut dengan keselamatan hidup mereka dari aspek ekologis, di aspek sosio-ekonomi juga sebagian mengancam keterpenuhan kebutuhan hidup karena bersentuhan dengan mata pencaharian, serta dampak-dampak lainnya. Sebut saja misalnya dampak buruk pertambangan di Morowali yang dianggap salah satu daerah penghasil nikel terbesar di dunia (Syarifuddin, 2022), begitu pula yang terjadi di Desa Baliara Selatan kabupaten Bombana yang menyisakan dampak negatif seperti mengikisnya budaya gotong-royong dari aspek sosial-budaya, Perubahan mata pencaharian akibat berkurangnya lahan pertanian dari aspek ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja yang kurang maksimal (Syahrir, 2017).

Dampak buruk yang terjadi akibat industri pertambangan di berbagai daerah seakan menjadi hal yang negatif dalam pemikiran warga Desa Baru, tak terkecuali yang bermukim di Desa Baru, sehingga seolah-olah memunculkan stereotipe bagi sebagian warga Desa Baru terhadap industri pertambangan. Indikasi tersebut nampak dari penuturan bahwa, terdapat salah satu perusahaan tambang saat awal-awal masuk, kehadirannya langsung mendapat penentangan dan penolakan oleh warga karena tidak adanya *Siloloa* (permohonan izin secara adat) oleh pihak perusahaan dengan warga setempat. Akibatnya masyarakat menganggap pihak perusahaan menerobos daerah mereka dan tidak menghargai adat istiadat mereka sehingga terjadilah gerakan-gerakan perlawanan dilakukan dari beberapa unsur masyarakat, mulai dari aparat desa, masyarakat biasa, pelajar hingga mahasiswa dalam bentuk demonstrasi.

Potensi konflik lainnya yang bisa saja terjadi berkaitan negosiasi warga dengan pihak perusahaan jika tidak menemukan kesepakatan. Bagi warga Desa Baru, sosialisasi hasil penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (andal) harus memastikan keikutsertaan banyak perwakilan dari seluruh unsur masyarakat. Karena di momentum itulah mereka akan menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka, membangun kesepakatan dengan perusahaan, serta mendengarkan apa saja kontribusi yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar tambang. Jika dalam pertemuan tersebut warga tidak menemukan kepuasan terhadap respons dari aspirasi-aspirasi mereka dari pihak perusahaan, maka kecenderungan warga akan menolak aktivitas operasional perusahaan, dan jika aktivitas operasional tetap dipaksakan berjalan maka akan menimbulkan amarah dan perlawanan dari warga seperti kasus tadi.

Keterlambatan pendaratan alat berat salah satu perusahaan pertambangan menjadi indikasi perlawanan warga akibat aspirasi mereka tentang lokasi pendaratan alat berat perusahaan tidak disepakati oleh warga, karena dianggap akan mengganggu aktivitas dan waktu istirahat mereka dikarenakan letak lokasi pendaratannya berdekatan dengan letak pemukiman warga. Hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja dan pemberian jabatan dalam perusahaan yang berpotensi memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan pandangan negatif dari oknum warga yang bersangkutan terhadap pihak perusahaan. Begitupun dengan nominal kompensasi ganti rugi lahan, pemerataan distribusi bantuan sosial oleh perusahaan kepada masyarakat atau hal-hal lainnya. Misalnya saja, program Tabuji Terang yang merupakan program bantuan penerangan listrik oleh salah satu perusahaan kepada warga Dusun Tabuji pada pemaparan sebelumnya. Program tersebut dinilai belum diterapkan dengan asas keadilan, karena masih sebagian besar warga belum tersentuh dengan program tersebut.

Mencermati dampak dari potensi-potensi terjadinya resistensi hingga konflik tersebut jika terjadi, maka kemungkinan kerugian yang terjadi pada masyarakat Desa Baru, termasuk yang bermukim di Dusun Tabuji bisa cukup besar dan berpengaruh terhadap tatanan sosial

budaya yang telah terbagun hingga menysar pula sektor ekonomi mereka. Hubungan disharmoni masyarakat Desa Baru dengan pihak perusahaan justru akan menutup sebagian potensi-potensi pemberdayaan sumber daya manusia yang tersedia yang akan berimbas pula pada pendapatan sektor keuangan. Kondisi lainnya juga berpotensi terhadap pembangunan infrastruktur oleh perusahaan pertambangan yang bukan saja dinikmati oleh pihak perusahaan, juka akan dinikmati pula oleh warga. Begitupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan, akan ikut terhambat sehingga berakibat pula pada miinimnya manfaat yang akan diberikan oleh perusahaan pertambangan untuk dinikmati oleh masyarakat.

## **2.2. Faktor-faktor yang menjadi potensi munculnya resistensi dan konflik antar sesama warga Desa**

Beroperasinya perusahaan pertambangan di suatu daerah dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan hampir sulit untuk dicegah oleh warga yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan. Terbukti dengan masih adanya pertambangan ilegal yang dioperasikan oleh masyarakat atau perseorangan, misalnya yang terjadi di Gunung Botak Kabupaten Buruh (Niwele et al., 2021), di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal yang pernah beroperasi di tahun 2004 hingga tahun 2017 (Sandi, 2018) dan yang terjadi di Kecamatan Ratatotok Kecamatan Minahasa Tenggara (Tongkotow et al., 2023). Jika pertambangan ilegal saja sulit dicegah, terlebih lagi aktivitas pertambangan yang dikelola oleh perusahaan yang sudah memiliki dokumen perizinan lengkap yang sah dari pemerintah. Artinya adalah tidak semua warga masyarakat menolak aktivitas pertambangan, terbukti seperti yang terjadi di beberapa daerah tadi yang pelakunya adalah masyarakat atau perseorangan. Begitu pula yang terjadi di Desa Baru Kecamatan Obi yang pelakunya adalah kelompok yakni Perseroan Terbatas (PT), meskipun objek pertambangannya adalah nikel.

Terdapatnya perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai menolak dan menerima kehadiran perusahaan pertambangan sehingga menimbulkan fragmentasi sosial dalam masyarakat. Mereka seakan dibatasi oleh pemaknaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas dan dampak pertambangan serta kepentingan yang berbeda. Kecenderungan mereka yang menerima aktivitas pertambangan adalah mereka yang memiliki tujuan ekonomi terhadap kehadiran perusahaan pertambangan. Sementara mereka yang menentang aktivitas pertambangan memiliki pandangan lain yang salah satunya misalnya berkaitan pemahaman tentang ancaman dari aspek lingkungan sebagai dampak dari pertambangan, juga terdapat di antara mereka yang memiliki motif ekonomi tetapi tidak terfasilitasi dengan baik oleh pihak perusahaan sehingga menimbulkan kekecewaan yang akhirnya ikut pula menentang aktivitas pertambangan. Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan kepentingan mengenai peran atau peluang atau bahkan dalam bentuk kepentingan yang lain yang tidak diakomodir oleh pihak perusahaan.

Seperti aksi demonstrasi yang pernah terjadi di Desa Baru sebagai bentuk perlawanan dari ketidakpuasan masyarakat dengan pihak perusahaan di beberapa tahun silam. Aksi tersebut dilakukan sebagai gerakan perlawanan warga yang tergabung dari beberapa elemen masyarakat, seperti aparat pemerintah desa, tokoh pemuda, pelajar dan mahasiswa. Akan tetapi, Aksi tersebut disertai dengan perilaku anarkis berupa perusakan dan penyitaan aset-aset perusahaan. Akibatnya, sebagian warga yang awalnya mendukung aksi, berbalik mengecam sebagian warga yang tergabung dari aliansi tadi. Pengecaman tersebut dilatarbelakangi ketidak-sepakatan sebagian warga karena terjadi perusakan dan penyitaan aset-aset perusahaan. Hal tersebut dikarenakan menurutnya yang berwewenang menghakimi perusahaan bukan warga, tetapi aparat penegak hukum. Akhirnya muncullah perpecahan sesama warga karena perbedaan pandangan tadi meskipun mereka sama-sama menolak aktivitas pertambangan. Terdapat pula pandangan negatif kepada warga lain yang saat itu tidak mau ikut berdemonstrasi. Bahkan mereka dicurigai mendukung kehadiran dan aktivitas pertambangan. Terlebih lagi bagi warga yang kebetulan keluarga terdekatnya ikut mengambil bagian sebagai tenaga kerja di perusahaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)



menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sering diartikan oleh masyarakat bahwa yang berhak mengelola kegiatan pertambangan adalah negara, bukan pihak perusahaan, sementara terdapat pula yang menafsirkannya bahwa ketika pihak perusahaan telah diberikan izin oleh pemerintah, artinya pemerintah telah memberikan wewenang kepada perusahaan tersebut yang kemudian selanjutnya dimaknai bahwa melawan aktivitas pertambangan oleh perusahaan yang telah diberikan izin resmi oleh pemerintah berarti melawan kebijakan pemerintah, dan sama halnya juga melawan negara.

Sementara bagi mereka yang menentang aktivitas pertambangan berasumsi dari pemaknaan tentang bunyi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas seluruh perusahaan pertambangan, tidak terkecuali bagi perusahaan yang memiliki dokumen perizinan resmi dan lengkap dari pemerintah, menjadikan dasar bagi mereka untuk menolak kehadiran perusahaan pertambangan. Perbedaan pandangan dan pemahaman tersebut diduga menjadi pemicu sehingga rentang terjadi konflik antar sesama warga masyarakat dalam merespons kehadiran perusahaan pertambangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara internal otomatis akan berdampak pada munculnya kerugian-kerugian baik secara materil maupun non materil yang akan dialami oleh masyarakat Desa Baru sendiri. Misalnya berkaitan dengan adanya konflik kepentingan tadi, justru akan membuat fragmentasi dalam masyarakat dengan hadirnya kelompok-kelompok pro perusahaan pertambangan dan anti perusahaan pertambangan. Konsekuensi sosialnya akan menimbulkan terjadinya isolasi sosial yang sangat berpengaruh terhadap integrasi masyarakat, dan berpengaruh pula pada aspek-aspek lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial budaya mereka.

Dampak eksternal dari kondisi tadi akan berpengaruh terhadap citra negatif masyarakat Desa Baru oleh pihak perusahaan bahkan masyarakat luar. Dengan kondisi tadi, maka akan membawa imbas negatif pula terhadap potensi pengembangan dan penguatan ekonomi mereka, belum lagi kerentanan di aspek keamanan sebagai akibat terjadinya konflik kepentingan yang berimbas pada hubungan dan integrasi sosial kemasyarakatan mereka. Olehnya itu sangat penting bagi masyarakat Desa Baru untuk menyadari agar mengurangi terjadinya resistensi maupun konflik yang merugikan bagi mereka. Di sini, pihak pemerintah perlu berperan dan berpartisipasi langsung untuk mengedukasi dan mengarahkan visi-misi masyarakat baik secara personal maupun secara sosial agar searah untuk mencapai tujuan yang sama melalui pendekatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa Baru secara umum.

### **2.3. Faktor-faktor yang menjadi potensi munculnya resistensi dan konflik antara warga dengan Pemerintah.**

Kebijakan Pemerintah terhadap izin pertambangan seringkali menuai polemik dari masyarakat. Asumsi bagi pemerintah yang cenderung menilai bahwa kehadiran perusahaan pertambangan di wilayahnya akan membawa peningkatan pendapatan daerah hingga nasional, serta penciptaan lapangan kerja khususnya bagi masyarakat desa yang bermukim di sekitar lokasi tambang, sehingga menjadi pertimbangan khusus dalam memberikan perizinan. Sementara bagi masyarakat yang anti tambang cenderung merasa bahwa meskipun perizinan tambang diberikan, tetapi sebelumnya harus ada konsultasi yang memadai dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam memutuskan perizinan. Hal tersebut didasari pertimbangan dari dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan.

Selain resistensi dan konflik muncul di antara pihak warga dengan perusahaan dan antar sesama warga seperti yang diuraikan sebelumnya, terdapat pula potensi muncul resistensi dan konflik antara pihak warga dengan pihak pemerintah. Misalnya berkaitan dengan perizinan. Berdasarkan penuturan informan, terdapat warga yang beranggapan bahwa perizinan perusahaan pertambangan tidak lepas dari tugas dan kewenangan pihak pemerintah desa sebagai jalur koordinasi antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah

di atasnya. Dengan demikian, perizinan perusahaan pertambangan ikut dipengaruhi oleh rekomendasi dan arahan dari pemerintah desa. Olehnya itu, dampak negatif dari aktivitas pertambangan ikut menjadi tanggung jawab pemerintah desa pula.

Bagi warga yang menolak aktivitas pertambangan di Desa Baru, menurut mereka pemerintah desa semestinya mendukung jika ada aspirasi penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan, atau minimal tidak terlibat dalam upaya-upaya mendukung dan memfasilitasi perusahaan khususnya dalam hal-hal yang bersifat administratif, misalnya memfasilitasi pihak perusahaan berkaitan dengan data-data administrasi desa yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan saat pemetaan lokasi rencana, saat penyusunan dokumen andal, dan keperluan-keperluan lainnya. Menurutnya, dengan demikian berarti pihak pemerintah desa secara tidak langsung melindungi warganya dari ancaman dampak-dampak negatif aktivitas pertambangan.

Resistensi juga terjadi karena faktor peran dan status yang selalu melekat pada diri seorang aparatur desa dalam setiap kehidupan sehari-harinya. Terlepas aparatur desa tersebut berada di forum formal maupun dalam pergaulan biasa sesama warga lainnya. Dalam kondisi itu, terlebih lagi jika sedang hangat perbincangan antar warga berkaitan dengan dampak-dampak negatif aktivitas pertambangan, ia merasakan tekanan secara psikologis akibat status yang melekat dalam dirinya. Hal tersebut terjadi karena menurutnya perbincangan dalam forum formal terkadang ikut terbawa dalam perbincangan biasa disaat berbaur dengan masyarakat dengan status sebagai warga biasa. Sehingga dalam kondisi seperti itu, status sebagai aparatur pemerintah desa dan sebagai warga biasa seakan tidak ada perbedaan antara statusnya sebagai aparatur maupun sebagai warga yang melekat dalam diri.

Tekanan psikologis seperti itu menurut pengakuan informan memaksanya untuk senantiasa berhati-hati dalam mengeluarkan ungkapan-ungkapan kepada warga meskipun dalam suasana berada bukan dalam jam kerjanya sebagai aparatur, misalnya saat berbaur dengan warga di saat ada hajatan-hajatan keluarga yang digelar, atau sekedar berbincang-bincang biasa dengan warga di sekitar halaman rumah. Pernah suatu ketika, informan berbincang-bincang dengan salah seorang warga dalam suasana kekeluargaan pada suatu acara hajatan yang diselenggarakan oleh warga. Pada saat itu, niatnya hanya sekedar ingin meluruskan pemikiran warga tentang beberapa dampak positif hadirnya perusahaan pertambangan, tetapi justru dimaknai oleh salah seorang warga lainnya sebagai ungkapan dukungan dan pembelaan terhadap dampak kehadiran perusahaan pertambangan di desa mereka. Misalnya tentang keinginan perusahaan membuka lapangan kerja untuk warga. Hal tersebut juga dimaknai seolah-olah bahwa aparatur pemerintah desa seakan-akan ikut melindungi kepentingan perusahaan pertambangan.

Kasus lain misalnya berkaitan dengan alih fungsi lahan yang mengakibatkan lahan yang sebelumnya diolah oleh warga akan diambil alih oleh pihak perusahaan, meskipun terdapat kompensasi perusahaan kepada warga terhadap nilai lahan beserta isinya, tetapi ketika terdapat ketidakpuasan warga terhadap nominal yang direalisasikan atau bahkan nominal saat masih tahap penaksiran, biasanya yang menjadi sasaran aduan adalah pemerintah desa. Hal tersebut dikarenakan pemahaman warga terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat sekaligus penghubung dan fasilitator terhadap hubungan vertikal maupun hubungan horizontal antar sesama masyarakat.

Idealnya, pemerintah dengan seluruh lapisan dalam masyarakat memiliki hubungan yang harmonis di segala aspek agar pencapaian visi, misi dan tujuan pemerintahan berjalan secara maksimal. Pemerintah sebagai bagian dari masyarakat berfungsi sebagai pengikat, penghubung, pengayom, fasilitator sekaligus pelindung dan pelayan bagi masyarakat untuk membantu keperluan-keperluan mereka, sedangkan masyarakat membantu pemerintah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pemerintahan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat UUD 1945. Tetapi hubungan tersebut tidak selama harmonis karena seringnya terjadi perbedaan cara pandang sehingga tercipta perbedaan pendapat antara pemerintah dengan masyarakat.

Perbedaan cara pandang antara masyarakat Desa Baru dengan pemerintahnya di tingkat desa terkadang menimbulkan resistensi yang berujung pada hubungan yang kurang

harmonis. Dampaknya, masing-masing pihak akan merasakan kerugian. Misalnya bagi pemerintah akan merasakan kendala-kendala yang mengakibatkan terhambatnya program-program yang telah direncanakan, sementara bagi masyarakat akan mengalami keterlambatan dalam merasakan program-program pemerintah yang memang sudah diperutukkan kepada masyarakat.

Untuk meminimalisir munculnya resistensi masyarakat terhadap pemerintah, baiknya pemerintah melibatkan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat terutama warga yang bermukim di sekitar lokasi rencana pertambangan dalam pengambilan kebijakannya, jika perlu melibatkan mereka dalam upaya advokasi sebelum memutuskan pengambilan dan penetapan kebijakan.

### **3. Taktik Ekonomi warga Tabuji Menghadapi Rencana Aktivitas Pertambangan**

Antropologi Ekonomi merupakan cabang dari studi Antropologi yang lebih tepat dikatakan sebagai disiplin yang mempelajari sistem ekonomi secara komprehensif dari sistem ekonomi paling tradisional hingga paling modern. Sistem ekonomi yang terjalin dengan elemen struktur sosial dan kebudayaan. Kekuatan ekonomi di tingkat lokal hingga global, memiliki pendekatan yang memposisikan ekonomi sebagai bagian dari aspek kebudayaan. Akan tetapi sebaliknya juga sebagai salah satu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebudayaan (Berman & Pasaribu, 2021: 65).

Kasper dan Streit mengungkapkan bahwa kebudayaan mempengaruhi perilaku sosial, termasuk perilaku ekonomi di dalamnya. Kebudayaan yang dimaksud terdiri dari bahasa, kumpulan ide atau pemikiran, nilai-nilai, institusi internal dan eksternal. Juga mencakup kesenian, ritual, simbol dan pengalaman seseorang. Yang mana komponen yang ada di dalam kebudayaan tersebut terbentuk melalui proses dan menjadi pondasi bagi perilaku manusia baik perilaku sosial maupun perilaku ekonomi (Mariawati, 2006:7).

Resistensi dan konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Baru pada dasarnya bermotif ekonomi. Hal tersebut terjadi bukan saja pada saat proses eksploitasi dan pengolahan hasil pertambangan oleh perusahaan seperti yang terjadi di banyak daerah pertambangan lainnya di Indonesia, tetapi justru terjadi di tahap perencanaan seperti saat prospeksi dan penelitian umum lokasi untuk kelengkapan dokumen operasional oleh pihak perusahaan. Hal tersebut didasari oleh pemahaman warga bahwa di setiap lokasi pertambangan umumnya meninggalkan kerusakan lingkungan yang nantinya berdampak pada kehidupan anak cucu mereka, sehingga mendorong mereka melakukan langkah-langkah preventif untuk meminimalisir hingga mengantisipasi potensi parahnya kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan sebagai dampak aktivitas pertambangan, sekaligus sebagai langkah proteksi ekonomi melalui cara-cara resiprositas.

Warga Desa Baru memaknai bahwa pihak perusahaan yang melaksanakan aktivitas pertambangan pasti mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil yang akan mereka dapatkan, sementara warga yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan kelak akan menanggung dampaknya di kemudian hari, bahkan meskipun perusahaan tersebut sudah berhenti beroperasi di sekitar lokasi pemukiman mereka. Bahkan, lebih jauh dampak tersebut akan dirasakan pula oleh anak cucu mereka kelak. Berdasarkan pemahaman tersebut, warga berinisiatif untuk mencari celah agar bisa mendapatkan keuntungan bahkan sebelum perusahaan tersebut beroperasi melalui taktik resiprositas.

Resiprositas merupakan pemaknaan tentang proses timbal balik dalam relasi sosial dalam bentuk pemberian penghargaan / pujian atas apa yang telah dilakukan orang lain, pemberian status tertentu pada seseorang berdasarkan *prestise* ataupun *previllage* mereka, menempatkan seseorang pada strata tertentu (resiprositas langsung), maupun dalam bentuk reward atau imbalan secara sosial (tidak langsung) (Masithoh et al., 2018). Pemahaman makna tentang resiprositas bahwa proses timbal balik dalam relasi sosial tidak hanya dapat diukur layaknya orang melakukan transaksi atas jual beli untuk mendapatkan barang maupun jasa. Terdapat dua jenis nilai yang dihasilkan dari resiprositas, yakni pertama adalah nilai instrumental yang berkenaan dengan hubungan timbal balik yang bersifat transaksional ekonomis dan yang kedua adalah nilai simbolik atau komunikatif. Artinya *reward* atas apa yang telah kita berikan kepada orang lain bukan hanya berbentuk transaksional secara ekonomi

ataupun material, lebih dari itu ada simbol-simbol sosial yang hendak ingin diperoleh dari seseorang (Masithoh et al., 2018:84)

Salah satunya wujud dari taktik resiprositas yang dilakukan oleh warga Desa Baru misalnya mengupayakan aspirasi-aspirasi mereka diwujudkan dalam bentuk kesepakatan menyangkut kepentingan ekonomi mereka dalam pembahasan dokumen andal sebagai suatu program wajib dan tanggung jawab sosial oleh pihak perusahaan. Setelah dokumen tersebut diteruskan oleh Kepala Desa ke anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan masyarakat, warga menilai bahwa dalam dokumen tersebut belum sepenuhnya memuat aspirasi-aspirasi mereka, sehingga masih ada permintaan-permintaan masyarakat selain yang termuat di dokumen AMDAL yang kemudian disampaikan dengan pendekatan personal antara warga dengan pihak perusahaan.

Strategi tersebut merupakan bagian dari taktik resiprositas mereka, misalnya membangun komunikasi langsung dengan pihak manajemen perusahaan berkaitan potensi apa saja yang bisa mereka dapatkan sehingga bisa memberikan keuntungan. Komunikasi tersebut bertujuan untuk membangun kesepakatan-kesepakatan personal secara emosional antara warga dengan pihak perusahaan yang bersifat kondisional, yang menurut mereka tentang bagaimana kondisi dan kebutuhan perusahaan maupun warga yang bersangkutan pada saat itu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya terkait kebutuhan perusahaan tentang tenaga kerja dan kebutuhan warga untuk mendapatkan penghasilan melalui suatu bidang lapangan pekerjaan tertentu sebagai karyawan tetap dalam perusahaan, menawarkan jasa-jasa mereka kepada pihak manajemen perusahaan dalam momentum-momentum tertentu, misalnya sebagai penunjuk jalan atau pemandu lapangan saat pihak perusahaan melakukan survey lapangan, menawarkan jasa penyeberangan menggunakan perahu tradisional yang dikombinasikan dengan mesin penggerak modern saat pihak perusahaan membutuhkan, dan lain sebagainya.

Berbeda di saat forum-forum pertemuan formal, aspirasi-aspirasi yang mereka bawa lebih dominan untuk kepentingan masyarakat secara umum, sedangkan di luar pertemuan formal, aspirasi yang dibawa pada kondisi ini cenderung sifatnya untuk kepentingan personal hingga kepentingan keluarga tertentu dan cenderung tergantung kondisi, situasi atau kebutuhan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, merupakan hal yang wajar bagi mereka untuk mengupayakan bahkan menuntut sesuatu yang menurut mereka bisa memberikan keuntungan terlebih dahulu untuk mendukung upaya-upaya proteksi ekonomi mereka.

Tumpuan ekonomi warga Desa Baru khususnya yang bermukim di Dusun Tabuji adalah sektor perkebunan yang sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Terdapat dua jenis lahan yang dimanfaatkan oleh warga Dusun Tabuji dalam berkebun. Pertama adalah lahan marga yang hanya dimiliki oleh marga *Pou*, dan lahan milik jemaat yang dimiliki secara komunal. Pihak perusahaan mengidentifikasi pada lahan tersebut sebagian akan menjadi lokasi eksplorasi pertambangan, sementara di lahan tadi warga Dusun Tabuji telah memelihara tanaman perkebunan produktif yang bernilai ekonomis. Agar warga dengan pihak perusahaan menerima manfaat dari lahan tersebut, maka terjadilah kesepakatan bahwa pihak perusahaan akan memberikan kompensasi berupa ganti rugi. Untuk lahan marga, perusahaan memberikan kompensasi lahan beserta seluruh tanaman produktif yang telah dipelihara oleh marga *Pou*. Sedangkan untuk tanah jemaat, pihak perusahaan hanya akan memberikan ganti rugi pada tanaman produktif yang bernilai ekonomis yang dipelihara oleh jemaat pada lahan tersebut.

Meski secara nominal terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi nominal tersebut hanya dijadikan sebagai acuan untuk transaksi antara warga yang bersangkutan dengan pihak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan warga menginginkan nominal yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pihak perusahaan dan pihak warga berinisiatif menempuh jalan tengah, yakni memilih nominal antara regulasi pemerintah dengan nominal kalkulasi perusahaan. Kesepakatan tadi merupakan salah satu dari taktik resiprositas warga untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal.

Pada bidang pemberdayaan, warga mengaspirasikan kepada pihak perusahaan untuk memprioritaskan warga Desa Baru, khususnya bagi warga Dusun Tabuji yang bermukim lebih dekat dari lokasi rencana pertambangan saat perekrutan tenaga kerja. Saat ini, telah ada

beberapa orang warga yang sudah diterima bekerja untuk perusahaan, meski demikian warga masih berharap kuantitas warga yang masuk sebagai tenaga kerja kedepannya bisa lebih banyak dari yang sekarang. Begitupun dalam program CSR perusahaan. Saat ini telah ada bantuan pihak perusahaan berupa penerangan listrik, meski baru dirasakan sebagian kepala keluarga yang bermukim di Dusun Tabuji. Sama dengan program perekrutan tenaga kerja, warga masih megupayakan agar pihak perusahaan menyalurkan bantuan lebih banyak lagi untuk dirasakan oleh masyarakat.

Di bidang pendidikan, saat ini anak-anak warga Dusun Tabuji yang menempuh pendidikan di tingkat menengah dan atas harus meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya gedung sekolah di lingkungan mereka, sehingga mengharuskan orang tua mereka menyewakan kamar kost selama masa pendidikan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan mereka untuk mengatasi kendala jarak, sarana transportasi dan waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Dengan jumlah 110 kepala keluarga di Dusun Tabuji, mereka berharap kontribusi perusahaan pertambangan agar secepatnya sudah terdapat bangunan sekolah untuk tingkat menengah dan atas.

Begitu pula di bidang kesehatan. Warga mengaspirasikan adanya asuransi bantuan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan khususnya kepada warga-warga lansia termasuk dana sosialnya seperti biaya pengobatan, termasuk pula penyediaan transportasi kesehatan seperti mobil ambulance. Sarana dan prasarana infrastruktur lokal juga turut menjadi perhatian. Warga mengaspirasikan pihak perusahaan memprioritaskan pembangunan jalan terutama jalan penghubung antara Dusun Tabuji dengan dusun lain di Desa Baru. Jarak tempuh antara Dusun Tabuji dengan pusat pemerintahan desa memang cukup jauh disertai jalanan akses darat yang sulit. Terlebih jika musim hujan, perjalanan dari Desa Baru ke Dusun Tabuji hanya bisa ditempuh melalui jalur laut dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.

Berkaitan dengan aspek lingkungan, rencana pihak perusahaan membangun dermaga untuk kepentingan operasional perusahaan di bibir pantai Dusun Tabuji ditentang oleh warga. Warga menilai pembangunan di titik lokasi tersebut selain mengurangi nilai estetika pantai yang diproyeksikan akan diusulkan menjadi salah satu titik destinasi wisata pantai juga akan mengganggu ekosistem laut seperti terumbu karang diklaim berpotensi akan rusak, ikan-ikan yang warga klaim berkembang biak di sana akan terganggu sehingga mempersempit areal penangkapan ikan untuk konsumsi keluarga.

Gambar 1. Titik lokasi rencana pembangunan dermaga berdasarkan informasi warga



Apa yang dilakukan warga tadi merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan resiko, yakni mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Strategi-strategi tersebut diharapkan dapat membantu warga di sekitar lokasi tambang untuk lebih siap menghadapi aktivitas pertambangan sambil mengupayakan pertahanan ekonomi mereka dalam menunjang kualitas hidup dan kesejahteraannya. Aspirasi-aspirasi tadi merupakan poin resiprositas warga yang diaplikasikan dalam bentuk taktik ekonomi, yang mana penekanannya bahwa perusahaan boleh saja beroperasi di daerah Desa Baru, dengan catatan memperhatikan dan memenuhi syarat budaya dalam bentuk permohonan izin kepada warga (siloloa) dan kepentingan sosial warga di sekitar tambang baik yang termuat dalam dokumen andal maupun aspirasi yang disampaikan secara personal dan kelompok yang tidak termuat dalam dokumen andal.

## KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat tentang dampak negatif aktivitas pertambangan yang akan dirasakan dalam waktu yang lama, memunculkan suatu inisiatif untuk menemukan celah dimana mereka bisa menemukan keuntungan-keuntungan ekonomi bahkan sebelum perusahaan pertambangan melakukan aktivitas eksplorasinya. Inisiatif tersebut dipraktikkan dalam bentuk taktik ekonomi berupa praktik resiprositas yang dibangun atas kesepakatan-kesepakatan dari aspirasi warga dengan pihak perusahaan, baik melalui pertemuan formal maupun pertemuan non-formal. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terjalin melalui dua arah, yakni terjalin melalui jalur intervensi sosial berupa fenomena resistensi dan konflik, dan pendekatan personal antara warga dengan pihak perusahaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ungkapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun khususnya kepada ketua Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memberi ruang untuk pendanaan dalam kegiatan Penelitian ini. Begitu pula kepada pejabat di lingkup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun yang telah membuka kesempatan kemitraan bagi dosen-dosen khususnya Program Studi Antropologi Sosial untuk pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

Terima kasih juga kepada Pemerintah Desa Baru serta para informan, terkhusus bapak Sekretaris Desa Baru yang bersedia menjadi informan sekaligus membantu peneliti menemukan informan-informan untuk mendukung pengumpulan data dalam proses penelitian ini, yang dengannya peneliti mendapatkan pengetahuan baru berkaitan dengan dinamika masyarakat sekitar areal pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghafur. (2022). Antropologi Ekonomi. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i1.768>
- Berman, O., & Pasaribu, P. (2021). Studi Antropologi Ekonomi Petani Kopi Arabika di Desa Sinaman II Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 5(2), 62. <https://doi.org/10.20961/habitus.v5i2.59771>
- Brata, N. T. (2010). Konflik Dan Integrasi Masyarakat Sekitar Tambang Emas Di Papua, Dalam Kajian Antropologi-Politik. *Forum Ilmu Sosial*, 37(2), 127–136. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/1515/1670>
- Harjanti, W. (2006). Indonesian Government Alternative Efforts in Reducing the Negative Impact Of Mining Activity In Indonesia. *Risalah Hukum*, 3, 44–52.
- Hudayana, B. (2020). Konsep Resiprositas dalam Antropologi Ekonomi. *Humaniora*, 3(1), 146–150. <http://jsp.uhn.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/04-Jurnal-Eden-Sitompul.pdf%0A>
- Masithoh, N. D., Wijaya, M., & Kartono, D. T. (2018). Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v2i1.17390>
- Mulka, S. R. (2020). Dinamika Konflik Masyarakat Dan Pemerintah Terhadap Dampak Pertambangan Batu Bara Di Kota Samarinda. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3),

- 213–223. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.306>
- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2021). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54–64.
- Risal, S., Paranoan, D., & Djaja, S. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 1(3), 516–530. <https://doi.org/10.30872/JAR.V1I3.482>
- Sandi, D. M. (2018). Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal (2004-2017). *Jurnal Education and Development*, 4(PULAN Kegiatan penambangan emas di Kecamatan Batang Natal sejak dahulu sudah dilakukan masyarakat menggunakan cara tradisional dan alat sederhana, baru semenjak tahun 2004, tambang emas di daerah ini mulai dikelola menggunakan mesin. Faktor yang mendorong), 125–128.
- Sondakh, J. (2017). Bagi hasil investasi sebagai hak masyarakat adat pada wilayah pertambangan di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 27–46.
- Sudarti, & Hindiyati, S. H. (2021). Respon Masyarakat Terhadap Reklamasi Lahan Bekas Tambang Semen Sebagai Ekowisata Di Daerah Sale Kabupaten Rembang. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.25078/pba.v6i1.1943>
- Syahrir. (2017). *Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel dalam Kehidupan Masyarakat Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana*. 37–39. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7103/>
- Syarifuddin, N. (2022). *Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali*. 1, 19–23. <https://doi.org/10.25042/jrt2k.122022.03>
- Tongkotow, E., Pati, A. B., & Posumah, D. (2023). *Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Minahasa Tenggara*. 1(1), 1–14.
- Wahyuni. (2018). Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resisten Dalam Masyarakat. *Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1), 1–9.
- Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2024). Manajemen Konflik. In *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>
- Zuhdi, S., Wahyudi, B., & Munawwaroh, T. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 4(1), 45–72. <http://139.255.245.7/index.php/DRK/article/view/205>